

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

AISAH AMAL SHOLEKAH

12070522777

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
Administrasi Negara (S.Sos)



OLEH:

AISAH AMAL SHOLEKAH

12070522777

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Aisah Amal Sholehah
 Nim : 12070522777
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Irdayanti, S.IP, MA
 NIP. 19860311 202321 2036

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau terjemahan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aisah Amal Sholekah
Nim : 12070522777
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Rabu, 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
 NIP. 19771227 202321 2010

Sekretaris
Virna Museliza, SE, M.Si
 NIK. 130 712 073

- Hak Cipta** milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisah Amal Sholekah
 NIM : 12070522777
 Tempat/Tgl. Lahir : Sragen, 22 Oktober 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Aisah Amal Sholekah
 NIM : 12070522777

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU

Oleh :

Aisah Amal Sholekah

Nim. 12070522777

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Indonesia yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa yang akan datang. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan anak-anak, yang mengakibatkan pertumbuhan fisik yang terhambat. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan penurunan stunting bisa menekan angka stunting di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Percepatan Penurunan Stunting dalam menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan model teori Marille S. Grindle dengan indikator isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi program Percepatan Penurunan Stunting sudah dilaksanakan secara optimal ditingkat pemerintahan Kabupaten dan Kota, hal ini dibuktikan berdasarkan data prevalensi stunting menurut SSGI pada tahun 2023 Kota Pekanbaru mencapai di angka 8,7%. Kemudian juga dengan adanya program-program penurunan stunting dari dinas dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mempermudah dalam penanggulangan kasus stunting di setiap kecamatan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Penurunan Stunting



ABSTRACT

ACCELERATED IMPLEMENTATION OF STUNTING REDUCTION BY THE PEKANBARU CITY POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING OFFICE

Oleh :

Aisah Amal Sholekah

Nim. 12070522777

This research is motivated by the high number of stunting in Indonesia which affects the quality of human resources (HR) in the future. This condition occurs due to chronic malnutrition during childhood growth, which results in stunted physical growth. It is hoped that the implementation of the stunting reduction policy can reduce the stunting rate in Pekanbaru City. The aim of this research is to find out how the Stunting Reduction Acceleration Program is implemented in reducing stunting rates in Pekanbaru City. This research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. Researchers use Marille S. Grindle's theoretical model with indicators of policy content and implementation environment. Based on the research results, it can be concluded that the implementation of the Acceleration of Stunting Reduction program has been implemented optimally at the district and city government levels, this is proven based on data on the prevalence of stunting according to the SSGI in 2023, Pekanbaru City reached 8.7%. Then, with the existence of stunting reduction programs from the department and the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS), it makes it easier to deal with stunting cases in each sub-district.

Keywords: Implementation, Program, Stunting Reduction

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'allaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis mengucapkan segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Skripsi ini berjudul **“IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU”**. Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan peneliti. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Teristimewa keluarga tercinta Ayahanda Suprpto dan Ibunda Yuwiwik orang tua tercinta yang senantiasa membesarkan, mendidik dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kasih sayang serta memberikan doa, cinta, motivasi dan dukungan penuh segi materi maupun non materi sampai saat ini dalam menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, M.Hum selaku wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Juliana, SE, M.Si selaku wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Sekertaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Irdyanti, S.IP, M.A selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan memberi arahan dalam penulisan skripsi dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT nantinya Aamiin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas ilmu-ilmu yang telah dibrikan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Teruntuk adik satu-satunya saya Hafifah Alsiah yang selalu mendoakan dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Drs. H. Muhammad Amin, M.Si selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas.
13. Kepada seluruh staf atau pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terimakasih atas segala bantuan selama penulis melakukan penelitian di Dinas.
14. Kepada seseorang Bisma Agung, S.ST yang selalu menemani saya dan menjadi support system dalam jarak jauh. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan banyak saran, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya dan bersedia mendukung saya hingga saat ini.
15. Terimakasih untuk sahabat yang ada dalam susah dan senang kepada Prawita Sari, Lisa Afani, Jesika Silalahi, Ridha Widi Subayanti, Ayang Permata Sari dan Tri wulandari, teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan diperantauan yang banyak memberikan motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Kepada keluarga besar mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara lokal D angkatan 2020.

17. Terimakasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan, kuat dan sabar sampai di titik ini, selamat kamu sudah berhasil mendapatkan gelar S.Sos dengan kerja kerasmu. Maaf untuk segala kelelahan, kesusahan, masalah serta kesedihan yang hadir tak terduga. Tetap tersenyum, berbuat baik kesemua orang dan tetap semangat. Perjuangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Terus berusaha menjadi versi terbaik dirimu.

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

Aisah Amal Sholekah

12070522777

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan	18
2.3 Implementasi Program	25
2.4 Organisasi Publik	26
2.5 Definisi Stunting	27
2.5.1 Faktor Penyebab Stunting	28
2.5.2 Ciri-Ciri Stunting	30
2.5.3 Dampak Stunting	31
2.5.4 Cara Mencegah Stunting	32
2.6 Program Percepatan Penurunan Stunting	34
2.7 Pandangan Islam Terhadap Stunting	37
2.8 Penelitian Terdahulu	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional	41
2.10 Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5 Informan Penelitian	46
3.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	50
4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	50
4.1.1 Gambaran Umum	50
4.1.3 Susunan Organisasi	52
4.1.4 Tugas dan Fungsi.....	53
4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	63
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	64
5.1 Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	64
5.1.1 Isi Kebijakan	65
5.1.2 Lingkungan Implementasi.....	87
5.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.....	95
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Prevelensi Stunting Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	2
Tabel 1. 2 Presentase Stunting di Kota Pekanbaru.....	4
Tabel 1. 3 Balita dan Baduta Beresiko Stunting di Kecamatan Wilayah Kota Pekanbaru	6
Tabel 1. 4 Penetapan Fokus Penanganan Stunting Kota Pekanbaru	7
Tabel 2. 1 Penelitian Perdahulu.....	39
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	41
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 5. 1 Rapat Penurunan Stunting.....	66
Gambar 5. 2 Presentase Hasil Stunting di Kota Pekanbaru	70
Gambar 5. 3 Sasaran Stanting	73
Gambar 5. 4 Data Baduta Dan Balita Berisiko Stunting.....	74
Gambar 5. 5 Penetapan SK Stunting.....	77
Gambar 5. 6 Prevalensi Stunting.....	82
Gambar 5. 7 Tim Pecepatan Penurunan Stunting.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan gizi seperti stunting memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Sebab, permasalahan ini erat kaitannya dengan kemiskinan, yakni berkaitan dengan pengetahuan mengenai masalah kesehatan pangan dan gaya hidup di tingkat rumah tangga. Status gizi suatu masyarakat tidak hanya mempengaruhi umur dan angka harapan hidup, namun juga status kesehatan yang merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan. Penanggulangan permasalahan gizi erat kaitannya dengan strategi nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif (Norsanti, 2021).

Mempersiapkan negara Indonesia menuju generasi emas pada tahun 2045 tidaklah mudah. Generasi emas 2045 merupakan hal yang tidak mudah dikarenakan stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun. Kondisi ini mengganggu dinamika Indonesia Generasi Emas 2045 dan harus segera dihilangkan agar pertumbuhan tidak terhambat (Hafzana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, 2021). Kekurangan gizi kronis pada kehidupan awal akan merugikan masa depan, termasuk kurang pendidikan, keterampilan kognitif yang lebih buruk, pendapatan yang lebih rendah dan lebih tinggi kemungkinannya hidup dalam kemiskinan (Tampubolon, 2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah belakangan ini adalah membahas permasalahan kesehatan yang cenderung buruk. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama saat ini adalah masih tingginya anak balita pendek (Kementerian Desa, 2017) .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penurunan stunting ialah dengan cara membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Nasional yaitu kementerian/lembaga, Tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan tingkat Desa (Peraturan Presiden, 2021)

Prevelensi stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 1. 1 Prevelensi Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2018	2019	2021	2022
1	Kuantan Singing	24,6%	29,55%	22,4%	17,8%
2	Indragiri Hulu	32,2%	29,67%	23,4%	16,7%
3	Indragiri Hilir	32,2%	27,43%	28,4%	28,5%
4	Pelelawan	25,5%	22,97%	21,2%	11,2%
5	Siak	21%	27,43%	19%	22%
6	Kampar	32,1%	23,07%	25,7%	14,5%
7	Rokan Hulu	27,3%	24,37%	25,8%	22%
8	Bengkalis	32,3%	21,07%	21,9%	8,4%



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9	Rokan Hilir	38,1%	28,87%	29,7%	14,7%
10	Kepulauan Meranti	29,9%	25,1%	23,3%	17,5%
11	Kota Pekanbaru	16%	18,58%	11,4%	16,8%
12	Dumai	17,3%	11,59%	23%	12,8%

Sumber: (Disdaldukkb, 2022b)

Berdasarkan table 1.1 diatas dapat dilihat dari 12 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru memiliki prevalensi stunting yang fluktuasi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang dikatakan masih cukup tinggi dan setiap tahunnya bisa mengalami penurunan. Pada tahun 2013 prevalensi stunting di Kota Pekanbaru sebesar 34,7% yang kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 16%. Setelah itu pada tahun 2019 prevalensi stunting mengalami peningkatan sebesar 18,58%, pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 11,4% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan prevalensi stunting sebesar 16,8%. Hal ini merupakan persoalan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Stunting di Kota Pekanbaru mengalami fluktuasi merujuk pada perubahan yang signifikan berdasarkan data SSGI dalam angka prevalensi stunting setiap tahunnya tidak stabil dalam suatu kondisi, baik itu mengalami kenaikan maupun penurunan. Faktor penyebab dari fluktuasi prevalensi stunting yaitu kondisi ekonomi seperti pendapatan keluarga yang terjadi kisis ekonomi atau ketidakstabilan sosial yang mengurangi akses makanan bergizi dan layanan kesehatan, kesadaran dan pendidikan masyarakat merupakan edukasi gizi tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi pada anak-anak dapat berubah tergantung pada intensitas dan keberlanjutan program edukasi, layanan kesehatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu dan anak merupakan layanan kesehatan yang baik selama kehamilan, persalinan, dan imunisasi dan pemantauan gizi sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke posyandu.

Salah satu Provinsi Riau yang berada di Kota Pekanbaru merupakan lokus stunting pada tahun 2018-2023. Adapun data stunting yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Presentase Stunting di Kota Pekanbaru

Tahun	Presentase Stunting
2018	16%
2019	18,58%
2021	11,4%
2022	16,8%
2023	8,7%

Sumber : (Disdaldukkb, 2022b)

Dari hasil table 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru memiliki data stunting dari tahun ketahun dapat mengalami kenaikan dan penurunan angka stunting. Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dalam angka stunting. Ini berarti bahwa ada periode di mana angka stunting mengalami peningkatan dan ada juga periode di mana angka tersebut menurun.

Gubernur Riau mengatakan target yang ingin dicapai dalam penanganan stunting adalah kurang dari 14%, yang berada di bawah target nasional. Kemudian memerlukan kerja sama antar pendamping, bidan, PKK, lurah, dan camat untuk menurunkan angka stunting di Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Pekanbaru juga telah mencanangkan program pemberian tambahan gizi kepada ibu hamil dan anak stunting, termasuk pembagian susu tambahan, telur, beras, dan makanan



pokok setiap bulannya. Selain itu, baznas memberikan dukungan kepada keluarga yang menderita stunting dan kemiskinan (Kemenkopmk, 2023).

Permasalahan gizi buruk di Indonesia merupakan permasalahan kesehatan yang belum mampu diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari data survei dan penelitian seperti Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang melaporkan bahwa prevalensi stunting jangka sangat pendek di Indonesia sebesar 19,3%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia pada tahun 2013 (19,2%). Hal ini menunjukkan masih banyak anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia yang menderita gizi buruk kronis dan program pemerintah yang dilakukan selama bertahun-tahun belum sepenuhnya berhasil (Candra, 2020).

Stunting adalah suatu kondisi dimana anak tidak dapat berkembang akibat kekurangan gizi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, anak-anak berukuran lebih kecil dari anak-anak normal pada usia yang sama dan memiliki perkembangan berpikir yang lambat (Kementerian Kesehatan, 2018)

Stunting pada anak menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya penyakit kronis dan kematian, gangguan pada perkembangan otak, gangguan terhadap perkembangan motorik dan terhambatnya pertumbuhan mental anak. Pertumbuhan tidak optimal dalam masa janin dan atau selama periode 1000 HPK memiliki dampak jangka panjang dimana bila faktor eksternal (setelah lahir) tidak mendukung, pertumbuhan stunting dapat menjadi permanen hingga anak tumbuh sebagai remaja pendek. Faktor ekonomi keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyebabkan kurangnya asupan gizi pada anak dan masih rendahnya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Putri & Zulkarnaini, 2023).

Stunting merupakan perkembangan langsung dari perkembangan anak yang tidak tepat atau digambarkan dengan perkembangan mental, mental dan spiritual yang di bawah standar, sehingga menjadi bagian dari masalah. Selain itu, kesehatan buruk yang terus-menerus sepanjang pertumbuhan dan perkembangan paling dasar pada awal kehidupan, dijelaskan oleh kurangnya energi, protein dan yang menghambat perkembangan idea (Afdayati Dwi Putri & Kusuma Habibie, 2022).

Berdasarkan survey dan data yang diperoleh, maka jumlah balita yang beresiko stunting di kota Pekanbaru pada tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Balita dan Baduta Beresiko Stunting di Kecamatan Wilayah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Data 2022		Data 2023	
		Baduta	Balita	Baduta	Balita
1	Sukajadi	630	1193	442	1114
2	Pekanbaru Kota	358	550	275	552
3	Sail	199	555	199	555
4	Lima Puluh	359	814	182	707
5	Senapelan	426	788	250	719
6	Rumbai Barat	524	1117	296	1035
7	Bukit Raya	1515	3036	1099	3073
8	Bina Widya	1350	2610	999	2490
9	Marpoyan Damai	2346	4490	1949	4476
10	Tenayan Raya	1419	3104	1280	3207
11	Payung Sekaki	1210	2663	961	2529
12	Rumbai	1478	3287	963	3084
13	Tuah Madani	2837	6027	2061	5887
14	Kulim	1365	2865	1198	2804

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Kasim Riau

15	Rumbai Timur	746	1435	500	1383
Total		16.770	34.531	12.654	33.615

Sumber: (Disdaldukkb, 2024)

Pada data table diatas penetapan intervensi Balita dan Baduta beresiko stunting tahun 2022 baduta berjumlah 16.770 dan tahun 2023 turun menjadi 12.654. Kemudian data balita beresiko stunting tahun 2022 berjumlah 34.531 dan tahun 2023 mengalami penurunan berjumlah 33.615. Data ini diperoleh dari hasil analisis situasi dengan menggunakan data cakupan intervensi atau data prevalensi stunting di Kota Pekanbaru.

Dari fokus penanganan stunting tahun 2022. Dengan dasar penetapan fokus penanganan stunting kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Penetapan Fokus Penanganan Stunting Kota Pekanbaru

No	Kriteria	Kota Pekanbaru
1	Jumlah Kecamatan/Kelurahan	15/ 83
2	Jumlah penduduk tahun 2020	983.356 jiwa
3	Presentase prevalensi stunting tahun 2023	8,7%
4	Tingkat penduduk miskin	35,96 jiwa

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru juga terus melakukan kerjasama dengan aktor-aktor seoptimal mungkin dengan instansi-instansi terkait yang berkaitan dalam penanganan kasus gizi buruk ini, seperti dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Agama, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Puskesmas dan Posyandu atau kader di setiap daerah, maupun dengan kecamatan. Sehingga kasus gizi buruk ini selalu dapat



ditangani dengan cepat, tepat, dan nantinya akan dapat mengurangi kasus gizi buruk yang ada di Kota Pekanbaru.

Pemilihan Kota Pekanbaru, karena angka stunting yang tidak stabil atau fluktuasi pada perubahan signifikan dalam angka stunting setiap tahunnya pada tahun 2013 sebesar 34,7% memungkinkan prevalensi stunting yang sangat tinggi menunjukkan masalah gizi yang serius. Pada tahun 2018 sebesar 16% penurunan yang signifikan dalam lima tahun menunjukkan adanya intervensi yang stabil, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendukung penurunan ini. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 18,58% mengalami kenaikan kembali setelah penurunan menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan kembali meningkatnya angka stunting, pada tahun 2021 sebesar 11,4% terjadinya penurunan lagi menunjukkan bahwa ada faktor atau intervensi yang efektif. Kemudian 2022 sebesar 16,8% terjadi peningkatan signifikan kembali menunjukkan adanya ketidakstabilan dan mungkin faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi.

Dapat dilihat bahwa data stunting Kota Pekanbaru merupakan wilayah yang angka stunting menunjukkan adanya fluktuasi dalam angka stunting. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru melakukan beberapa program yaitu Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting, Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting, Dapur Sehat Atasi Stunting, Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota, dan Audit kasus stunting (Disdaldukkb, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan kemudian 83 kelurahan dengan luas wilayah 632,26 Km. Melihat kejadian stunting di Kota Pekanbaru yang masih cukup tinggi. Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 233 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau, bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan, perkembangan anak, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita (Peraturan Gubernur, 2022).

Keputusan Wali Kota Pekanbaru No. 263 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru. Bahwa untuk efektivitas dan sinergitas pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru, maka perlu mengubah Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pekanbaru (Walikota Pekanbaru, 2022).

Dari Penelitian Ilmiah Wahana Pendidikan Tentang Strategi Dinas Dalam Kesehatan Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru dengan hasil penelitian kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini pada dinas kesehatan dalam penanganan Stunting di kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Dalam penanganan stunting di kota Pekanbaru yang dikembangkan menjadi tiga indikator yaitu program, anggaran dan prosedur memberikan dampak yang baik.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk, melakukan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus stunting yang terjadi agar penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang khususnya masyarakat Pekanbaru dengan tujuan berkurangnya penderita stunting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kota Pekanbaru Oleh karena itu, penelitian ini di angkat dengan judul
**“Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian
 Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di Latar Belakang, maka penulis dalam penelitian dapat merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Impelementasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Impelementasi Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan pengetahuan sebagai bekal, kemudian menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan dunia kerja dan menambah wawasan dibidang pelayanan publik.

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai suatu bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor dan Kota Pekanbaru sebagai lokus stunting untuk memperbaiki kesehatan dan keadaan lingkungan di wilayah kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi referensi bagi peneliti bersama penelitian analisis kinerja karyawan dan layanan, kemudiam menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, konsep operasional dan kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian berupa lokasi dan waktu, jenis data, sumber data, informan, validasi data dan analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis memberikan bagaimana gambaran umum tentang objek penelitian seperti ruang lingkup kegiatan dan menggambarkan uraian tugas pada objek penelitian.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menerapkan dari hasil hasil tahapan dan proses penelitian mulai dari analisis, desain, dan implementasinya.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUSKA RIAU



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan ialah rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan (pemerintahan, dan organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud untuk memandu manajemen dalam mencapai tujuan. Kebijakan biasanya berlaku untuk departemen pemerintah, organisasi, sektor swasta, dan individu. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya, bisa berupa tindakan atau bukan tindakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016).

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai serangkaian rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, dan sikap bertindak atau tidak bertindak, yang dilakukan oleh para aktor sebagai langkah menuju penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (Ramdhani, 2016).

Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008), mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian usulan yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang terdapat hambatan (kesulitan) sebagai suatu tindakan/kegiatan terhadap menerapkan kebijakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi



kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa kebijakan ialah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat ajang perdebatan para-para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa cara dan pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus beda dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan bagian dari perilaku dan harapan
- d. Kebijakan merupakan adanya tindakan atau tidak adanya tindakan
- e. Kebijakan memiliki tujuan akhir
- f. Kebijakan harus ada tujuan dan sasaran
- g. Kebijakan suatu proses yang terjadi setiap hari
- h. Kebijakan meliputi hubungan antar organisasi
- i. Kebijakan publik tidak jauh dari pemerintahan
- j. Kebijakan dirumuskan berdasarkan pembuat kebijakan (Taufiqurokhman, 2014).

Menurut Thomas R. Dye (1992), *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”*. Menurut Dye, ketika suatu pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka hal ini mempunyai tujuan. Ketika suatu pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, itu juga merupakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan publik yang mempunyai tujuan. Alasan mengapa suatu kebijakan harus dilaksanakan dan manfaatnya untuk hidup berdampingan bersifat menyeluruh sehingga kebijakan tersebut dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, Thomas Dye (1992) mengartikan kebijakan publik sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Agar kebijakan dapat memberikan manfaat yang diperlukan, alasan mengapa kebijakan tersebut perlu diterapkan dan manfaat hidup berdampingan perlu dipertimbangkan secara holistik. Agar kebijakan baik untuk masyarakat dan tidak merugikan, di sinilah pemerintah perlu menetapkan kebijakan dengan bijak.

Tujuan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan masyarakat dari perwakilan pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan tindakan yang sah dan sah karena kebijakan publik ditentukan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai legitimasi dalam sistem pemerintahan. Dan kebijakan publik hipotetis adalah kebijakan yang didasarkan pada teori, model, atau hipotesis tentang sebab dan akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi perilaku (Sahya Anggara, 2016).

James E. Anderson mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Kemudian kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Menurut David Easton Kebijakan publik adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberian nilai secara paksa (legal) kepada seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik bukan tidak berharga, namun penuh nilai.

Nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat melayani kepentingan sosial atau publik, dan pemerintah sebagai wakil masyarakat mempunyai insentif untuk merumuskan dan melaksanakannya sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik yang mengatur pemaksaan nilai-nilai umum kepada seluruh anggota masyarakat. Segala rumusan dan pengalokasian nilai-nilai masyarakat merupakan cara yang dipilih pemerintah untuk mencapai tujuannya (Suwitri, 2019)

Dunn dalam Wibawa (1994) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan pemerintah (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) untuk mengatasi permasalahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa unsur, antara lain sebagai berikut, sebagaimana disampaikan Anderson dalam (Delly Maulana, 2019: 3):

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau didasarkan pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan mencakup tindakan dan pola perilaku pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah tindakan yang sebenarnya dilakukan pemerintah, bukan niatnya.
4. Kebijakan publik bisa bersifat positif (tindakan pemerintah terhadap suatu isu tertentu) atau negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kebijakan publik (positif) selalu didasarkan pada peraturan hukum tertentu yang bersifat wajib (Maulana & Nugroho, 2019).

Selain melihat kebijakan publik melalui metode sistem dengan input, transformasi, output, dan feedback, kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai sebuah siklus atau tahapan tersendiri yang berulang. Adapun tahapan kebijakan tersebut adalah :

1. Identifikasi Masalah: mengembangkan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi permintaannya.
2. Analisis Masalah: mengolah, mengorganisasikan dan memilih data yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian dianalisis dan diubah menjadi laporan organisasi yang relevan.
3. Informasi Rencana Kebijakan: Berdasarkan laporan analisis, telah disusun rencana kebijakan. Rencana ini kemudian diserahkan ke subsistem komunitas yang berbeda terkait dengan masalah kebijakan sosial untuk mengumpulkan opini.
4. Pemilihan Model Kebijakan: pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan kebijakan.
5. Penentuan indikator sosial: untuk mencapai tujuan dan memilih model kebijakan yang terukur secara obyektif, perlu dikembangkan indikator



sosial dengan fungsi acuan, ukuran atau standar untuk rencana aksi dan hasil yang akan dicapai.

6. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik: tugas pada tahap ini adalah menghidupkan kembali rencana kebijakan yang telah diselesaikan (Abdulah et al., 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dipahami tidak hanya sebagai masalah teknis administratif, namun juga sebagai masalah politik. Karena Kebijakan Publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, maka kebijakan publik berlangsung dengan kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini berarti ada satu partai yang berkuasa dan partai memegang kendali.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau keputusan yang diambil seseorang, sekelompok dan pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran yang nyata. Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Kegiatan implementasi berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Ardyansyah, 2012).

Implementasi mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini berupaya mengubah keputusan ini menjadi model operasi dan berupaya membuat perubahan besar atau kecil seperti yang diputuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan yaitu :

1. Implementasi kebijakan *top-down* secara umum mengacu pada proses implementasi kebijakan yang menentukan apa yang ingin dicapai melalui tujuan-tujuan yang dinyatakan dan dengan cara-cara yang dijelaskan dalam undang-undang.
Menurut Nugraha (2008), implementasi kebijakan berlangsung secara linier, dari kebijakan publik, dari penciptanya, dan dari aksi kemanusiaan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik antara yaitu sebagai berikut:
 - a. Aktivitas komunikasi dan implementasi antar organisasi
 - b. Karakteristik pelaksana/ pelaksana
 - c. Kondisi ekonomi, kondisi sosial politik
 - d. Pelaksana kebijakan
2. Implementasi kebijakan *bottom-up*, pendekatan *bottom-up* memandang implementasi sebagai suatu proses interaksi dan negosiasi, yang berlangsung selama jangka waktu tertentu, antara pihak yang ingin menerapkan kebijakan dan pihak yang bergantung pada tindakan. Model

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ini melihat implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dikembangkan pemerintah bertujuan untuk membawa perbaikan atau perubahan pada perusahaan sebagai kelompok sasaran (Abdulah et al., 2022).

Menurut Abidin (2004) dalam (Awan Y. Abdoellan, 2016: 59) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

1. Faktor internal termasuk kebijakan yang dilaksanakan dan faktor pendukung dari kebijakan.
2. Faktor eksternal termasuk kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait dalam lingkungan implementasi.

Adapun beberapa model implementasi yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975)

Kedua pakar kebijakan publik tersebut di atas memaparkan teori atau modelnya berdasarkan argumen bahwa perbedaan implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang diterapkan. Karena pendekatan ini melibatkan menghubungkan permasalahan kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja atau prestasi kerja. Yang penting, perubahan, pengendalian dan kepatuhan merupakan konsep penting dalam proses implementasi. Berdasarkan pandangan tersebut, Van Meter & Van Horn membuat tipologi kebijakan.

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi (Awan Y. Abdoellan, 2016)

2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle (1980)

Keunikan model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif terhadap konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, penerima implementasi, bidang konflik yang mungkin timbul di antara aktor-aktor pelaksana, dan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk implementasi dan sumber daya yang diperlukan (Taufiqurokhman, 2014). Dalam (Sahya Anggara 2016: 254), dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada isi dan konteks, dan tingkat keberhasilan bergantung pada 2 variabel yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi.

a. Isi Kebijakan

Isi kebijakan atau program mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kebijakan yang kontroversial, dianggap tidak populis, atau memerlukan perubahan besar akan menghadapi penolakan baik dari pihak sasaran maupun pelaksana kebijakan yang merasa kesulitan atau dirugikan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Isi kebijakan yang menurut Merilee S. Grindle dapat mempengaruhi implementasi adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
Ketika suatu kebijakan tidak merugikan salah satu pihak implementasinya lebih mudah karena kepentingan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dari pihak yang dirugikan.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan
Kebijakan yang membawa manfaat bersama bagi banyak orang lebih mudah dilaksanakan karena mendapat dukungan dari kelompok sasaran dan masyarakat.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Semakin luas perubahan yang disyaratkan oleh kebijakan ini, maka akan semakin sulit penerapannya. Kredibilitas pesan politik tidak dapat dijamin karena kebijakan sanksi tidak diterapkan secara konsisten.
4. Letak pengambil keputusan
Semakin luas posisi pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan maka semakin sulit penerapannya. Kasus seperti ini sering terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak otoritas.
5. Implementasi program
Tingkat keberhasilan juga lebih tinggi bila pelaksana program mempunyai keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sumber daya yang digunakan

Implementasi akan difasilitasi jika sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Sumber daya ini ada dalam bentuk manusia, keahlian, pendanaan, peralatan, dan lainnya.

b. Lingkungan Implementasi

Lingkungan implementasi juga mempengaruhi tingkat keberhasilan, karena terlepas dari apakah kebijakan tersebut sederhana atau didukung oleh kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada pelaksanaannya.

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor

Ketika kekuatan politik tertarik pada suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk bersaing dalam implementasinya sehingga mereka dapat menikmati hasilnya dalam berkerjasama dengan aktor yang terlibat.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi program dapat menimbulkan konflik yang mempengaruhi kepentingan. Secara tidak langsung dapat menunjukkan karakteristik otoritas dan lembaga yang melaksanakannya.

3. Tingkat kepatuhan dan respons terhadap implementasi

Sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan (Sahya Anggara, 2016)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Model implementasi menurut George C. Edwardrs III

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dalam pengembangan kebijakan antara pengambilan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jika kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Bahkan kebijakan-kebijakan besar pun bisa gagal jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh para aktor politik. George C. Edwardrs III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu implementasi suatu kebijakan, mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang perlu dilakukan dan tidak mendistorsi implementasi, memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada (kelompok sasaran) akan berkurang.
2. Sumber Daya, yaitu isi kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tidak akan efektif jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya.
3. Disposisi, yaitu kepribadian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana mempunyai disposisi yang baik maka ia akan mampu melaksanakan kebijakan sesuai keinginan pengambil kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga tidak



akan efektif apabila para pelaksana mempunyai sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pengambil kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, yaitu struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung menimbulkan lemahnya pengawasan dan beban birokrasi (J. Pramono, 2020).

2.3 Implementasi Program

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mentransformasikan keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola operasional dan membawa perubahan, besar atau kecil, seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah memahami apa yang terjadi setelah suatu program diimplementasikan.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi terjadi setelah undang-undang disahkan yang mengesahkan suatu program, kebijakan, manfaat, atau hasil konkrit. Istilah “implementasi” mengacu pada serangkaian kegiatan yang mengikuti pernyataan niat pejabat pemerintah mengenai tujuan program dan hasil yang diinginkan. Implementasi melibatkan tindakan (tidak bertindak) oleh berbagai aktor, terutama birokrat, yang bertujuan agar program dapat berjalan (Santie, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Implementasi kebijakan dan program pada umumnya dipengaruhi oleh isi kebijakan dan status implementasi. Implementasi kebijakan secara keseluruhan dievaluasi dengan mengukur hasil program terhadap tujuan kebijakan. Hasil program ditentukan melalui dampaknya terhadap khalayak sasaran individu, kelompok, dan masyarakat. Implementasi merupakan perubahan dan penerimaan perubahan oleh kelompok sasaran (Zulfin, 2014).

Implementasi program adalah langkah-langkah untuk menjalankan suatu kebijakan berdasarkan tujuan yang sudah ditentukan. Dengan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.4 Organisasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri atas bagian-bagian orang dan dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu antar kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menjumpai suatu organisasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016)

Organisasi publik ialah suatu organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Orientasi organisasi publik merupakan untuk melayani masyarakat. Menurut Mahsun (2009) organisasi publik adalah organisasi publik yang melayani masyarakat dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi sektor publik terlibat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dalam penyediaan jasa dan barang yang memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Contoh organisasi publik meliputi kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi (Hubaisy et al., 2014).

Dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah organisasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan public dan perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu antar kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Karena organisasi ini berfokus pada kebaikan bersama, biasanya organisasi ini tidak berfokus pada keuntungan sebagai tujuan utamanya.

2.5 Definisi Stunting

Stunting adalah suatu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan usianya. Kondisi ini diukur dengan panjang dan tinggi badan lebih dari minus dua standar deviasi di atas rata-rata standar pertumbuhan anak WHO. Stunting pada balita merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, nyeri pada anak, dan gizi buruk pada anak, Di masa depan, balita stunting akan sulit mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Stunting ialah kondisi pada balita yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dalam jangka waktu lama. Kondisi ini berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stunting pada dasarnya adalah kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada anak di bawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Masalah stunting merupakan salah satu permasalahan penting di bidang kesehatan anak dan masih menjadi perhatian utama terutama bagi anak-anak di negara terbelakang dan berkembang. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia, diperkirakan 149 juta anak di bawah 5 tahun mengalami kekurangan gizi (Akbar & Huriah, 2022).

2.5.1 Faktor Penyebab Stunting

Faktor-faktor yang memicu terjadinya stunting menurut Imam Akbar dan Titih Huriah (2022) yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Ibu

Kejadian stunting pada balita berkorelasi positif dengan tingkat Pendidikan ibu. Apabila ibu mempunyai tingkat Pendidikan yang rendah, maka angka kejadian stunting pada balita cenderung tinggi.

2. Tinggi Badan Ibu

Tinggi badan ibu mencerminkan status gizi karena seseorang mungkin disebabkan oleh faktor genetik akibat kondisi medis yang disebabkan oleh kekurangan hormon. Oleh karena itu, faktor ini berpotensi mengurangi kecenderungan genetik menjadi pendek. Kondisi tubuh pendek juga dapat disebabkan oleh faktor kesehatan ibu seperti kekurangan gizi atau penyakit. Ibu yang bertubuh pendek sering kali



melahirkan anak yang stunting dan sebaliknya. Jika ibu memiliki tinggi badan normal maka anak akan berkembang normal.

3. Faktor Ekonomi

Besarnya pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Anak-anak yang dari keluarga dengan status ekonomi rendah mengkonsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan dengan anak dari keluarga dengan status ekonomi lebih baik. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki berat badan dan tinggi badan lebih rendah dibandingkan anak-anak yang mampu secara ekonomi.

4. Pemberian ASI

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi segera setelah lahir. Menurut WHO, pemberian ASI eksklusif meliputi pemberian ASI saja kepada bayi hingga usia 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan. ASI dapat diberikan sampai anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu, hal ini dapat mengurangi risiko bayi terserang penyakit menular. Inilah sebabnya ada kaitan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting pada balita (Akbar & Huriah, 2022).

Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan 2018 tentang gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita bukan satu-satunya factor penyebab terjadinya stunting. Faktor intervensi yang paling penting untuk dapat mengurangi prelevansi stunting yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak. Adapun faktor-faktor penyebab stunting yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesalahan dalam merawat anak yang tidak efektif
2. Kurangnya layanan medis, seperti pelayanan kesehatan untuk ibu selama kehamilan
3. Kurangnya makanan sehat di rumah
4. Kurangnya akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih (Pratiwi, 2023)

2.5.2 Ciri-Ciri Stunting

Menurut Kementerian Kesehatan RI, balita dapat dikatakan stunting jika diukur panjang atau tinggi badannya dan dibandingkan dengan suatu standar dan hasil pengukurannya berada dalam kisaran di bawah normal. Seorang anak stunting atau tidak tergantung pada hasil pengukuran tersebut. Oleh karena itu, kita tidak bisa begitu saja memperkirakan atau menebaknya tanpa mengukurnya.

Selain tubuh yang perawakan pendek dari anak seumuran, terdapat ciri-ciri lain yaitu:

- Pertumbuhan melambat
- Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
- Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
- Usia 8 – 10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
- Berat badan bayi tidak naik bahkan cenderung menurun
- Perkembangan fisik anak terhambat, misalnya karena terlambat menarke (siklus menstruasi pertama pada anak perempuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi (Kemenkes, 2022).

2.5.3 Dampak Stunting

Stunting memiliki dampak buruk pada balita, dalam jangka pendek adalah mulai terganggunya perkembangan otak anak, kecerdasan berkurang, gangguan pada pertumbuhan fisik, dan gangguan pada metabolisme dalam tubuh anak. Anak yang mengalami stunting sejak dini, yakni sebelum usia 6 bulan, mempunyai risiko lebih tinggi mengalami stunting pada usia 2 tahun. Jika ini terjadi, perkembangan otak akan segera terancam. Otak erat kaitannya dengan reaksi anak karena didalam otak terdapat sel-sel syaraf, reaksi yang dimaksud meliputi melihat, mendengar dan berpikir pada saat proses belajar (S. E. dkk Pramono, 2022).

Stunting juga mempunyai konsekuensi jangka panjang yaitu kesehatan yang buruk, peningkatan risiko penyakit tidak menular, rendahnya tingkat kognitif dan prestasi akademik anak. Lansia mempunyai risiko tinggi terkena penyakit dan kecacatan serta kualitas pekerjaan yang tidak kompetitif sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas ekonomi.

Menurut WHO dampak stunting dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Dampak Jangka Pendek
 - a. Kejadian kesakitan dan kematian menjadi meningkat
 - b. Terganggunya perkembangan anak, baik kognitif, motorik, dan verbal
 - c. Meningkatnya biaya Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak Jangka Panjang

- a. Tinggi badan tidak normal, tidak sesuai dengan tinggi badan pada usia seharusnya
- b. Dapat mudah terkena obesitas, penyakit jantung dan lain-lain
- c. Kesehatan reproduksi terganggu
- d. Sulit mengikuti pelajaran saat sekolah
- e. Produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal (Wirasmoyo, 2019).

Stunting sangat merugikan performance anak terhadap perkembangannya. Jika kondisi stunting terjadi pada usia 0-3 tahun dimana merupakan masa golden periode atau perkembangan otak yang baik maka dapat berdampak pada tidak berkembangnya otak dan sulit untuk pulih kembali. Anak stunting memiliki IQ 5-10 lebih rendah dibandingkan anak normal. Stunting pada balita merupakan factor risiko peningkatan angka kematian, penurunan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik yang buruk serta masalah kesehatan dan ketidakseimbangan fungsi tubuh (Flora, 2008).

2.5.4 Cara Mencegah Stunting

Menurut candra (2020) berdasarkan penyebab stunting di atas, dapat dilakukan dengan cara untuk mencegah terjadinya stunting, adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting antara lain yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempersiapkan pernikahan yang baik

Sebaiknya pilihlah calon pasangan yang tidak mempunyai risiko sakit dan pilihlah calon pasangan yang memiliki penghasilan tetap untuk mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga. Faktor keturunan dari calon orang tua dan faktor sosial ekonomi erat kaitannya dengan stunting.

2. Pendidikan gizi

Pendidikan kesehatan dan gizi harus diberikan sejak dini. Pendidikan gizi memuat berbagai informasi kesehatan, tidak hanya penelitian teoritis tetapi juga penerapannya dalam kehidupan. Pola makan orang Indonesia cenderung kurang gizi, tanpa ada pedoman oleh karena itu, wajar jika status gizi penduduk Indonesia masih tergolong kurang gizi (malnutrisi).

3. Suplemen ibu hamil

Perkembangan janin di dalam rahim sangat bergantung pada kondisi fisik ibu hamil. Kesehatan ibu yang baik dan status gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang normal. Oleh karena itu, ibu hamil harus memenuhi kebutuhan gizi yang baik untuk dirinya maupun janinnya.

4. Suplemen ibu menyusui

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama bagi bayi. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas ASI sangat diperlukan. Kualitas dan kuantitas ASI sangat bergantung pada pola makan ibu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusui. Kebutuhan gizi saat menyusui hampir sama dengan saat hamil.

5. Suplemen mikronutrein untuk balita

Pemberian suplementasi mikronutrien pada balita selain berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan juga berpengaruh langsung terhadap kejadian penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan diare. Seng dan zat besi merupakan zat gizi penting untuk kekebalan tubuh. Defisiensi seng dan zat besi menurunkan kekebalan tubuh sehingga balita mudah terserang penyakit menular.

6. Mendorong peningkatan aktivitas anak diluar ruangan

Kegiatan di luar ruangan baik untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik, karena dengan beraktivitas di luar ruangan anak dapat menghirup udara segar dan mendapatkan manfaat dari paparan sinar matahari pagi.

2.6 Program Percepatan Penurunan Stunting

Program yang dibentuk berdasarkan juknis yaitu Kota Pekanbaru berdasarkan merupakan salah satu lokus stunting. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membentuk beberapa program yaitu:

1. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting

KB Kit Stunting merupakan sarana penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada Keluarga yang memiliki ibu hamil



dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi stunting. Pengadaan sarana BKB Kit Stunting untuk mendukung pelaksanaan kelas pengasuhan pada Kelompok BKB.

2. Operasional Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memantau perkembangan dan melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu pasca persalinan, anak usia 0-24 bulan. Kegiatan pemantauan kepada sasaran sebagaimana dimaksud di atas sebagai upaya mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting serta memfasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebutuhan sehingga terwujudnya 4 (empat) yaitu :

1. Memastikan semua sasaran terdata
2. Memastikan semua sasaran memperoleh pelayanan
3. Memastikan semua sasaran memanfaatkan intervensi dari pelayanan
4. Memastikan semua pelaksanaan dan pendampingan tercatat dan dilaporkan.

3. Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting

Kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko stunting dan balita yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada sasaran Berisiko Stunting. Pengamatan kepada sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memprediksi dan mendeteksi dini factor resiko stunting, memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki kondisi sasaran, serta menyediakan data dan informasi kondisi sasaran.

4. Dapur Sehat Atasi Stunting

Dapur Sehat Atasi Stunting adalah untuk pelaksanaan kegiatan pemberian edukasi gizi, pendampingan, dan pembiasaan konsumsi makanan bergizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting, dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan dapat berupa pemberian edukasi gizi kepada kader Dapur Sehat Atasi Stunting maupun kelompok sasaran (Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki balita) tentang pentingnya makanan bergizi dalam upaya pencegahan stunting.

5. Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi TPPS di tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan operasional yang mengikutsertakan TPPS dan mitra kerja lainnya di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung dan memastikan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di wilayahnya.

6. Audit kasus stunting

Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.

Kegiatan audit kasus stunting ada 4 tahapan audit kasus stunting yaitu:

1. Pembentukan tim audit kasus stunting di Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga
3. Diseminasi hasil audit kasus stunting dan rencana tindak lanjut
4. Evaluasi Rencana Tindak Lanjut dan evaluasi perubahan status risiko kasus audit stunting (Disdaldukkb, 2022).

2.7 Pandangan Islam Terhadap Stunting

Pencegahan stunting dalam pandangan islam merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS An-Nisa 4:9)

Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.



Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah : 233)

Stunting (Al-taqazzum) adalah suatu kondisi perkembangan fisik yang tidak merata pada bayi yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak masa bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dan keterlambatan pertumbuhan dapat menghambat pertumbuhan baik keterampilan motorik (gerakan) maupun keterampilan kognitif (pengetahuan) pada anak. Pencegahan stunting itu sunnah, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Perdahulu

No	Sumber	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1	<p>Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting</p> <p>Dahlan Tampubolon</p> <p>Jurnal Kebijakan Publik, Volume 11, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 1-58</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan penanganan stunting secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya intervensi terhadap stunting. Rokan Hulu melalui dinas kesehatan telah melakukan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan intervensi stunting. Sedangkan intervensi sensitif berada pada stake holder lintas sektor baik di level provinsi maupun kabupaten.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Percepatan Penanganan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru</p>
2	<p>Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru</p> <p>Selphi Afdayati Dwi Putri, Dedi Kusuma Habibie</p> <p>Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8(21), 457-466</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini pada dinas kesehatan dalam penanganan Stunting di kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik. Dalam penanganan stunting di kota Pekanbaru yang dikembangkan menjadi tiga indikator yaitu program, anggaran dan prosedur memberikan dampak yang baik.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah bagaimana intervensi yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting agar setelah adanya program-program yang cukup baik dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dapat menurunkan angka stunting.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>3</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang</p> <p>Feby Febriani, Rahmadhani Yusran</p> <p>Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, (Hal. 11-21)</p> <p>(Febrian & Yusran, 2021)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang belum adanya regulasi mempengaruhi kejelasan fungsi dan tugas pokok dari lembaga yang terlibat, tidak adanya anggaran khusus tentang pencegahan stunting serta belum adanya kesadaran saling membantu dalam percepatan pencegahan stunting secara bersama. Hal ini disebabkan karena anggapan rendahnya kejadian stunting di Kota Padang dan Kota Padang tidak termasuk ke dalam daerah lokus stunting.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan percepatan penurunan stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan menggunakan intervensi gizi spesifik untuk ibu hamil dan anak balita.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Implementasi Kebijakan Cegah Stunting di Desa Sepedes Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun</p> <p>Jurnal Awam, Vol 1 No 2 Tahun 2021</p>	<p>Penelitian ini melakukan sosialisasi kesadaran untuk mencegah stunting pada perempuan menikah atau perempuan yang merencanakan kehamilan namun belum menikah. Pemerintah Kabupaten Karimun perlu mengoptimalkan program pencegahan dan pengendalian stunting melalui intervensi dan juga perlu mempekerjakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses penurunan stunting dengan adanya program-program dilakukan dan hambatan apa yang mengakibatkan stunting masih cukup tinggi.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.9 Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Menggunakan teori Marilee S. Grindle (1980) menggunakan 2 variabel yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi	1. Isi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program • Jenis manfaat yang dihasilkan • Derajat perubahan yang ingin dicapai • Letak pengambil keputusan • Implementasi program • Sumber daya yang digunakan
	2. Lingkungan Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor • Karakteristik lembaga dan penguasa • Tingkat kepatuhan dan respons terhadap implementasi

Sumber: (Sahya Anggara, 2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

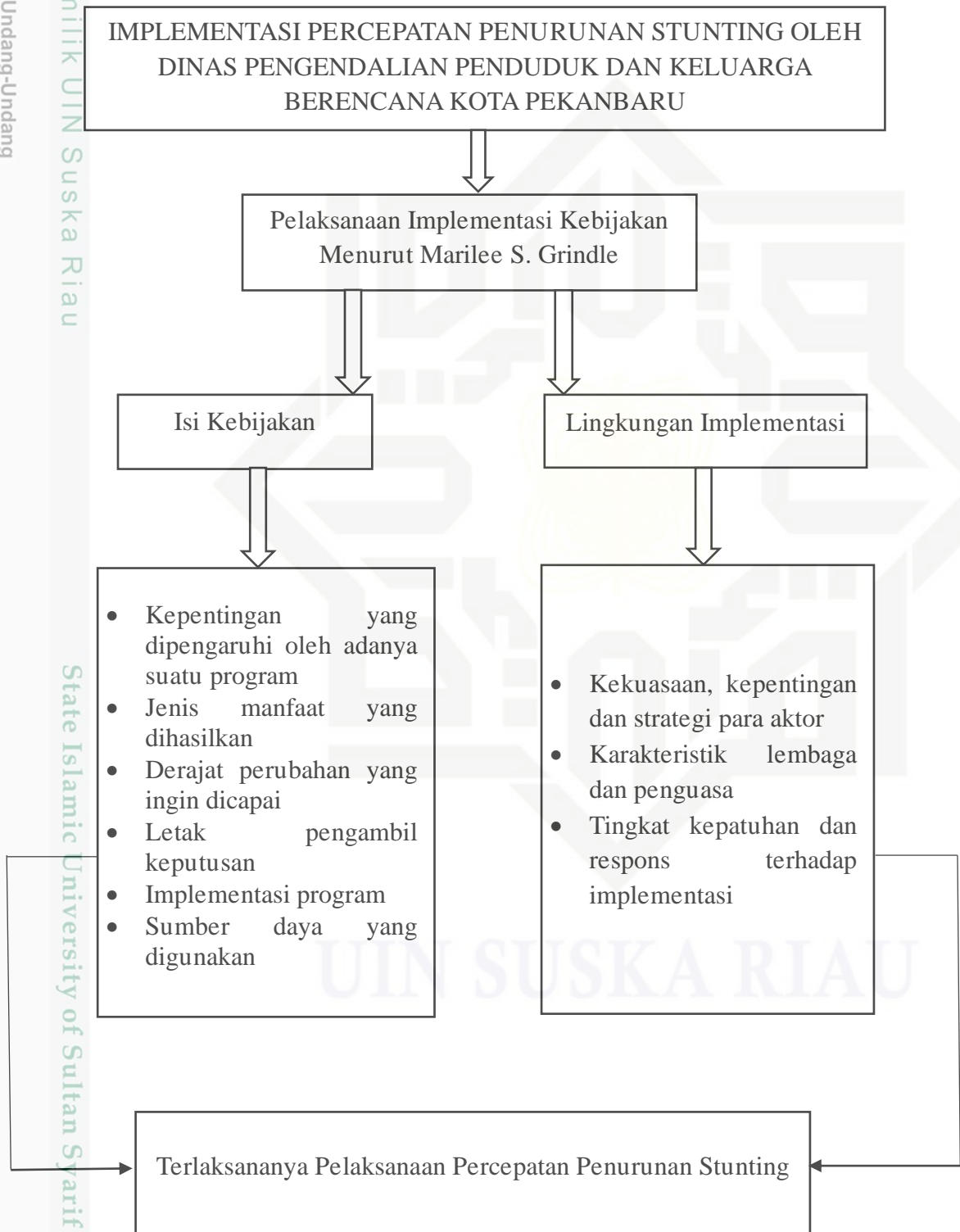
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:18) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (fenomena), digunakan untuk meneliti pada konisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan, situasi, bahkan peristiwa sebagaimana adanya, mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan dan memahami secara obyektif apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Merupakan penelitian mendalam terhadap perorangan, organisasi, program kegiatan, dan dalam kurun waktu tertentu, yang tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran atau gambaran menyeluruh tentang suatu entitas secara lengkap dan rinci. Sehingga dapat memperoleh data yang dapat dianalisis untuk menghasilkan teori.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Jl. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285 sebagai tempat berlangsungnya objek penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.3 Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta dan kebenaran. Fakta dalam sains dicatat sebagai data. Kemudian data akan diproses seperti itu dapat dijelaskan. Data merupakan bentuk jamak dari datum dan mengacu pada informasi yang menggambarkan masalah atau pengamatan terhadap karakteristik atau karakteristik suatu populasi atau sampel, seringkali dalam bentuk angka. Persyaratan data dari penelitian harus obyektif, memperhitungkan semua masalah pengambilan sampel, dan tepat waktu.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer diperoleh langsung dari sumber dengan melakukan pengukuran dalam penelitian, dihitung sendiri dalam bentuk observasi, wawancara, dan bentuk lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder merupakan data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap obyek yang dipelajari secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengamati, mencatat, mencatat peristiwa yang ada, mengumpulkan dan sebagainya, segala keadaan dan perilaku yang ada secara langsung di lapangan. Masalah yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan percepatan penurunan tunting dalam menurunkan angka stunting di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara seseorang, baik informan maupun responden, mengajukan pertanyaan mengenai sesuatu mengenai masalah yang sedang diteliti. Dengan cara melakukan percakapan melalui tatap muka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat data yang ada atau mengambil data dari dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2015) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbetuk gambar contohnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lincoln dan Guba menyatakan bahwa dokumen adalah dokumentasi atau film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian karena:

- a. Dokumentasi adalah sumber informasi yang stabil
- b. Berfungsi sebagai bukti tes
- c. Karena sifatnya yang alami, cocok untuk penelitian kualitatif
- d. Hasil tinjauan konten memberikan peluang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang apa yang telah diteliti.

3.5 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdapat 2 yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang berperan sebagai informasi utama, atau orang yang paling memahami permasalahan dan memberikan penjelasan tentang berbagai hal yang dibutuhkan peneliti. Informan kunci adalah orang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang muncul. Informan kunci dalam penelitian ini ialah kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

2. Informan Tambahan

Individu ditemukan di lokasi penelitian yang dapat memberikan data dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti. kemudian yang informan tambahan ditambahkan pada penelitian ini ialah orang-orang yang terlibat dalam Pelaksanaan Percepatan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penurunan Stunting dalam pelaksanaan penurunan stunting di Kota Pekanbaru.

Adanya informan dan narasumber dalam penelitian memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti dan beberapa pertimbangan.

Adapun yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
2	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1
3	Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	1
4	Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia	1
5	Masyarakat	2
	Jumlah	6

Sumber: Olahan Penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data, dan pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, pada saat wawancara, peneliti sedang menganalisis tanggapan dari orang yang diwawancarai. Setelah dilakukan analisis, apabila jawaban responden masih kurang memuaskan peneliti, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lebih lanjut sampai titik tertentu atau mencari jawaban yang memuaskan. Hanya dengan cara inilah data yang dianggap dapat diandalkan akan dikumpulkan.



Langkah-langkah analisa data setelah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data juga tentang merangkum dan memulihkan hal terpenting yang dianggap penting dan perlu. Hal ini memungkinkan data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Menurut Riyanto (2003), reduksi data mengacu pada rasionalisasi, seleksi, penyederhanaan dan abstraksi data. Dengan demikian, dalam reduksi ini terjadinya proses data yang terpilih dan data yang terbuang (tidak terpakai).

2. Penyajian Data

Penyajian data baru dapat dilakukan setelah reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan lain-lain. Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Agar teks tersebut tersusun dalam beberapa bagian, tidak tersusun secara bersamaan, tidak tersusun dengan baik, dan sangat berlebihan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah dilakukan penyajian data, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang

diperoleh peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan menjadi kesimpulan yang kredibel atau dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya (Ahyar et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Deskripsi umum tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 yang membahas tentang Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut.

4.1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB (Keluarga Berencana). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secretariat Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan, membawahi: seksi Advokasi dan penggerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana) dan KB (Keluarga Berencana), seksi Pengendalian penduduk dan informasi Keluarga. Bidang KB (Keluarga Berencana) membawahi seksi Distribusi Alokasi, Seksi jaminan Pelayanan KB (Keluarga Berencana), Seksi pembinaan Kesertaan KB (Keluarga Berencana). Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi: Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera, seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, seksi Bina Ketahanan Remaja, unit pelaksana teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional.

4.1.2 Kedudukan

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh KepalaBidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

4.1.3 Susunan Organisasi

1. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Seksi Distribusi Alokon
- 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB
- 3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
 - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

4.1.4 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan lainnya.
- b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengelolaan keuangan dinas.
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 5) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 6) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 8) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- 9) Penyusunan program dan anggaran dinas.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
 - 2) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - 5) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - 6) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- d. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sub Bagian Umum, mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan-perundangundangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
 - b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
 - c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
 - d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
 - e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
 - f) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
 - g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.



- h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 - i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 - j) Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
 - k) Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.

- c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e) Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga rencana.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 4) Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
 - 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota.
 - 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
- 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
 - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

4. Bidang Keluarga Berencana

- a. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana.
- b. Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
- 4) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota.
- 5) Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota.
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana.
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 10) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

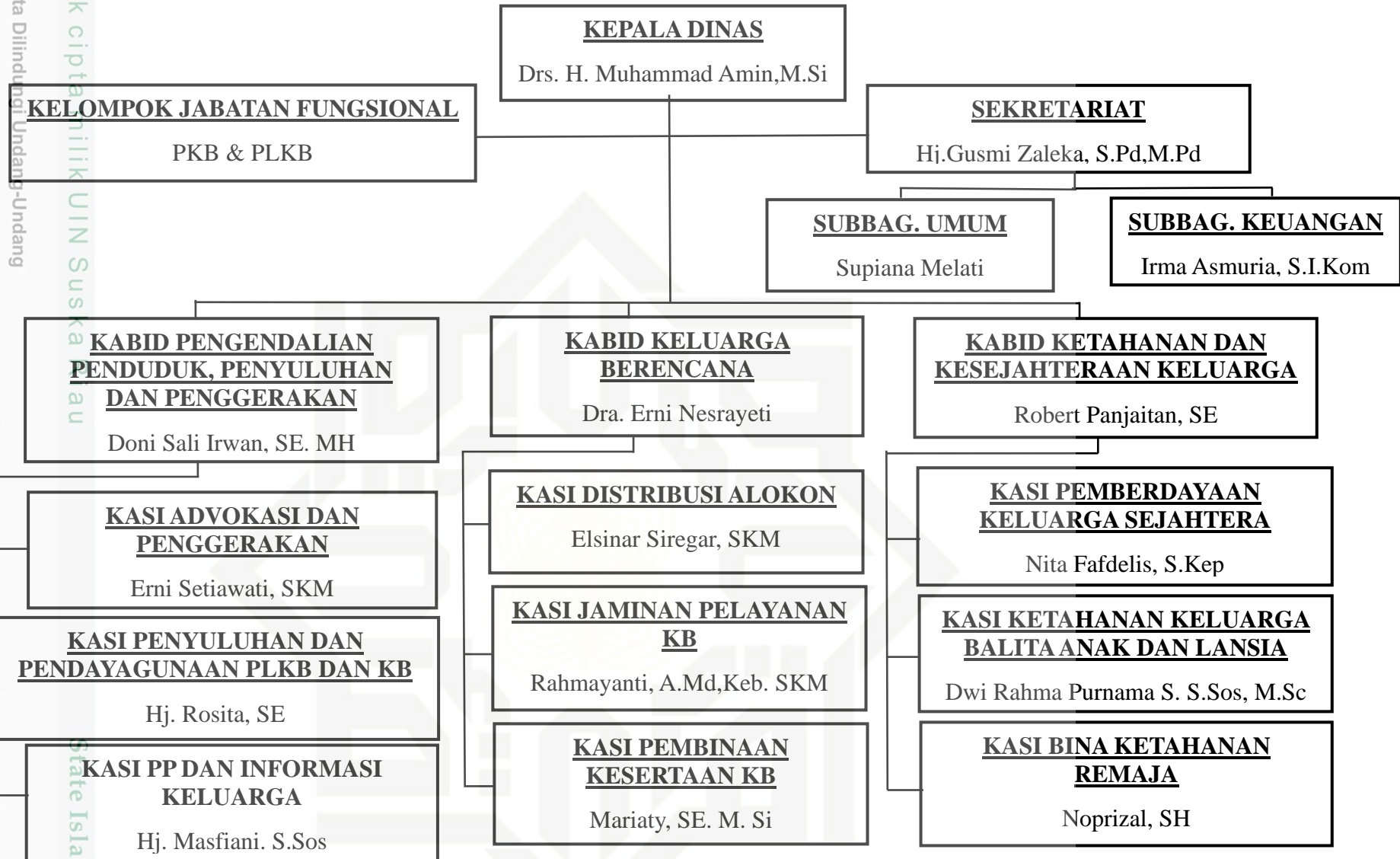


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga.
- 5) Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR).
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- 7) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- 8) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- 11) Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi percepatan penurunan stunting dalam menurunkan angka stunting. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru peneliti ingin melihat bagaimana mengimplementasikan program dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru. Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dengan 2 indikator yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru program percepatan penurunan stunting belum terlaksana secara optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, isi kebijakan dari aspek kepentingan adanya program sudah terlaksana tetapi masih ada masyarakat yang belum mengetahuinya. Dalam aspek perubahan yang ingin dicapai dapat dilihat dari penurunan stunting pada tahun 2023 sebesar 8,7%. Dari aspek implementasi program ini menjalankan kebijakan dari program-program percepatan penurunan stunting sudah dijelaskan kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan program sehingga mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dari aspek sumber daya di Kota Pekanbaru sudah cakap dan memiliki kualitas yang baik dalam pelaksanaan program. Kedua dari indikator lingkungan implementasi dari aspek tingkat kepatuhan dan respon terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi dari sisi negatif masih adanya masyarakat yang yang tidak mau membawa anak mereka ke posyandu untuk pemeriksaan sehingga akan menyebabkan stunting.

Adapun faktor yang menghambat implementasi percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru adalah faktor masyarakat enggan membawa anak mereka ke posyandu untuk pemeriksaan setiap bulannya, lalu kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya stunting mengakibatkan masyarakat tidak ingin mengikuti posyandu, kekurangan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas, hingga sosialisasi yang tidak maksimal masalah utama terhambatnya pencegahan stunting di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat dalam implementasi program Percepatan Penurunan Stunting dalam menurunkan angka stunting agar pelaksanaan program-program lebih baik kedepannya. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelaksana program-program stunting, peneliti berharap agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat melaksanakan program dengan baik dan merata keseluruh sasaran dari hulu sampai ke desa terpencil. Selain itu juga peneliti memberikan saran untuk membuat

mengadakan sosialisasi tentang stunting agar masyarakat lebih mengetahui stunting untuk pencegahan pada anak-anak.

2. Bagi masyarakat para peneliti perlu memastikan bahwa masyarakat terutama para ibu, berpartisipasi secara rutin dalam posyandu, dan bahwa pemerintah berupaya keras untuk mencegah dan mengurangi stunting guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas di masa depan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

QS An-Nisaa 4:9

QS Al-Baqarah 2:233

Abdulah, Fitri, A. H., Sari, A. M., Gistituati, N., & Rusdinal. (2022). *Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan*. 7(1), 148–155.

Afdayati Dwi Putri, S., & Kusuma Habibie, D. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Rejosari). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 457–466. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7302087>

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).

Akbar, I., & Huriah, T. (2022). *Modul Pencegahan Stunting*. 22. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/36596/Modul Pencegahan Stunting - EBOOK.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/36596/Modul%20Pencegahan%20Stunting%20-%20EBOOK.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Ardyansyah, D. (2012). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.

Awan Y. Abdoellan. (2016). *Buku Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.

Badan Pusat Statistik. (2020). Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. *Pemerintah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, 2023.

Candra. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*.

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrwxw_53QaJhPmUA3w_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEbnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bha7MtII8PgwQwYU-

Disdaldukkb. (2022a). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. *Lembaga Administrasi Negara*, 1689–1699.

Disdaldukkb. (2022b). *Laporan Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting*.

Disdaldukkb. (2024). Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Disdaldukkb*.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html>

Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21.

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>

Flora, R. (2008). *Stunting Dalam Kajian Molekuler*.

Haizana Bedasari, Frinda Novita, Azmi, Roli Sambuardi, P. S. (2021). *Jurnal*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Awam Vol 1 No 2 November 2021. 1(2), 45–50.

Hubaisy, Z., Suharsono, A., & Helpiastuti, S. B. (2014). Evaluasi Kinerja PDAM Kota Probolinggo dalam Perspektif Balanced Scorecard. *E-SOSPOL, 1(1)*, 10–24.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h.845.

Kemendes, R. (2022). *Ciri-Ciri Anak Stunting*. 2022.

Kemenkopmk. (2023). *Penanganan Stunting Harus Berkelanjutan 2023*
<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-penanganan-stunting-harus-berkelanjutan>. 2023.

Kementerian Desa. (2017). Buku saku desa dalam penanganan stunting. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*, 42.

Kementerian Kesehatan. (2018). *Stunting dan Pencegahannya 2018*
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2483/stunting-dan-pencegahannya. 2483.

Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. In *Cv. Aa. Rizky* (Issue September).

Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 3(1)*, 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>

Peraturan Gubernur. (2022). *Peraturan Gubernur Riau Tentang Stunting*.

Peraturan Presiden. (2021). *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021. 1*.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Pramono, S. E. dkk. (2022). Buku Panduan UNNES GIAT Pencegahan dan Penanganan Stunting. In *Mipa.Unnes.Ac.Id*. https://mipa.unnes.ac.id/v3/wp-content/uploads/2022/01/Buku-Panduan-GIAT_SDGs-Desa.pdf

Pratiwi, D. J. (2023). *Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan*.

Putri, V. Y., & Zulkarnaini, Z. (2023). Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam Program Pencegahan Stunting. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 276–287. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1329>

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>

Sahya Anggara. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.

Santie. (2016). MAP (Jurnal Manajemen dan Administrsi Publik) Vol . 1 No . 2 ISSN 2615-2142 ABSTRACT PENDAHULUAN Halaman 183-192. *Jurnal Manajemen Dan Adiministrasi Publik*, 1(2), 183–182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suwitri, S. (2019). Konsep Dasar Kebijakan Publik. In *Atmospheric Environment* (Vol. 42, Issue 13).
- Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 25–32.
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (Issue 1993).
- Walikota Pekanbaru. (2022). *Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022*.
- Wirasmoyo, B. (2019). Analisa Faktor Penyebab Kasus Stunting (Studi Kasus di Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur). In *Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang*.
- Zulfin. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, 1(July), 1–100.
<http://elibrary.almaata.ac.id/1714/%0Ahttps://osf.io/yejcm/%0Ahttp://elibrary.almaata.ac.id%0Ahttps://bmjopen.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjopen-2019-030624%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/2758%0Ahttp://stikara.ac.id/jupermik>



Lampiran 1

Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU

Informan :

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertanyaan :**Isi Kebijakan**

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
 1. Apa latar belakang berdirinya program percepatan penurunan stunting oleh pihak dinas?
 2. Apa saja program dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam penurunan angka stunting?
- b. Jenis manfaat yang dilakukan
 1. Apa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika pencegahan stunting dapat dilakukan dengan baik?
 2. Apakah dengan adanya kebijakan ini kasus stunting di Kota Pekanbaru terdapat penurunan?
- c. Dengan perubahan yang ingin dicapai
 1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung perubahan stunting sehingga dapat dicegah dalam menekan angka stunting yang terjadi di Kota Pekanbaru?
- d. Letak pengambilan keputusan
 1. Bagaimana langkah-langkah perumusan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?
- e. Implementasi program
 1. Siapa sajakah yang menjadi pelaksana dalam program penanggulangan stunting?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Sumber daya yang digunakan
 1. Bersumber dari manakah pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan stunting?

Lingkungan Implementasi

- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor
 1. Bagaimana strategi pemerintah dalam penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?
 2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan penurunan stunting?
- h. Karakteristik Lembaga dan penguasa
 1. Bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami stunting?
- i. Tingkat kepatuhan dan respon terhadap implementasi
 1. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting? Bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan :

Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pertanyaan :

Isi Kebijakan

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
 1. Apa saja program dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam penurunan angka stunting?
- b. Jenis manfaat yang dilakukan
 1. Apa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika pencegahan stunting dapat dilakukan dengan baik?
 2. Apakah dengan adanya kebijakan ini kasus stunting di Kota Pekanbaru terdapat penurunan?
- c. Dengan perubahan yang ingin dicapai
 1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung perubahan stunting sehingga dapat dicegah dalam menekan angka stunting yang terjadi di Kota Pekanbaru?
- d. Letak pengambilan keputusan
 1. Bagaimana langkah-langkah perumusan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?
- e. Implementasi program
 1. Apakah dalam pelaksanaan program stunting sulit penerapannya di Kota Pekanbaru?
- f. Sumber daya yang digunakan
 1. Apakah sumber daya seperti petugas gizi dilapangan mendapatkan pelatihan?

Lingkungan Implementasi

- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor
 1. Bagaimana strategi dinas dalam penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah pihak Dinas melakukan kegiatan kerja sama dengan aktor-aktor lain untuk penurunan stunting?
 - h. Karakteristik Lembaga dan penguasa
 1. Apakah faktor ekonomi dapat mempengaruhi stunting?
 - i. Tingkat kepatuhan dan respon terhadap implementasi
 1. Bagaimana respon dinas jika terdapat peningkatan jumlah kasus balita stunting?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan :

Kasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pertanyaan :

Isi Kebijakan

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
 1. Siapa sajakah yang berperan dalam program penanggulangan stunting?
- b. Jenis manfaat yang dilakukan
 1. Apa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika pencegahan stunting dapat dilakukan dengan baik?
- c. Dengan perubahan yang ingin dicapai
 1. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan program stunting?
- d. Letak pengambilan keputusan
 1. Bagaimana langkah-langkah perumusan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?
- e. Implementasi program
 1. Apakah pelaksanaan program stunting sudah terlaksana dengan baik di lingkungan masyarakat?
- f. Sumber daya yang digunakan
 1. Bagaimana untuk sarana dan prasarana penunjang upaya penanggulangan stunting?

Lingkungan Implementasi

- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor
 1. Apakah pihak Dinas melakukan kegiatan kerja sama dengan aktor-aktor lain untuk penurunan stunting?
 2. Apa yang dimaksud dengan upaya penurunan stunting dilakukan dengan Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting?
- h. Karakteristik Lembaga dan penguasa

1. Bagaimana tantangan upaya dinas untuk percepatan penurunan stunting di Kota Pekanbaru?

Tingkat kepatuhan dan respon terhadap implementasi

1. Bagaimana respon dinas jika terdapat peningkatan jumlah kasus balita stunting?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan :

Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia

Pertanyaan :

Isi Kebijakan

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
 1. Siapa sajakah yang berperan dalam program penanggulangan stunting?
- b. Jenis manfaat yang dilakukan
 1. Apakah dengan adanya kebijakan ini kasus stunting di Kota Pekanbaru terdapat penurunan?
- c. Dengan perubahan yang ingin dicapai
 1. Bagaimana perkembangan jumlah kasus balita stunting di Kota Pekanbaru?
- d. Letak pengambilan keputusan
 1. Bagaimana langkah-langkah dalam perumusan kebijakan penanggulangan stunting di Kota Pekanbaru?
- e. Implementasi program
 1. Sejauh mana pelaksanaan kebijakan program stunting telah diterapkan?
- f. Sumber daya yang digunakan
 1. Bagaimana untuk sarana dan prasarana penunjang upaya penanggulangan stunting?

Lingkungan Implementasi

- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor
 1. Apakah pihak Dinas melakukan kegiatan kerja sama dengan aktor-aktor lain untuk penurunan stunting
 2. Bagaimana mempercepat penurunan stunting yang dilakukan melalui Operasional Dapur Sehat Atasi Stunting?
- h. Karakteristik Lembaga dan penguasa

1. Apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa kembali kondisinya seperti anak bebas stunting?

Tingkat kepatuhan dan respon terhadap implementasi

1. Bagaimana sistem kerja tim struktur TPPS dalam kegiatan penanggulangan stunting?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan :

Mayarakat

Pertanyaan :

Isi Kebijakan

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya suatu program
 1. Apakah menurut ibu dengan adanya program-program stunting dapat mengatasi stunting?
- b. Jenis manfaat yang dilakukan
 1. Bagaimana menurut ibu manfaat apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika pencegahan stunting dilakukan dengan baik?
- c. Dengan perubahan yang ingin dicapai
 1. Apakah pelaksanaan program stunting sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah menurut ibu?
- d. Letak pengambilan keputusan
 1. Bagaimana cara mencegah stunting agar tidak terjadi pada anak menurut ibu?
- e. Implementasi program
 1. Bagaimana pelaksanaan program stunting di masyarakat, apakah membawa perubahan bagi masyarakat?
- f. Sumber daya yang digunakan
 1. Apakah sumber daya seperti petugas gizi atau makanan sehat diberikan saat posyandu?

Lingkungan Implementasi

- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor
 1. Siapa saja yang terlibat dalam penanggulangan stunting menurut ibu?
 2. Langkah apa yang dapat ibu lakukan untuk penanganan stunting menurut ibu sebagai masyarakat?
- h. Karakteristik Lembaga dan penguasa

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya stunting khususnya yang terjadi di masyarakat menurut ibu?

Tingkat kepatuhan dan respon terhadap implementasi

1. Bagaimana respon masyarakat terkait dengan adanya program penurunan stunting?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Satgas Stunting)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan perwakilan Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
(Kak Nisa)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kasi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia
(Kak Kiky)**



**Wawancara dengan informan lainnya satu bidang Satgas Stunting
(Kak Bella)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat Ibu Siti dan Ibu Hani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PANULIS



Penulis bernama AISAH AMAL SHOLEKAH lahir di Sragen, 22 Oktober 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suprpto dan Ibu Yuwiwik. Penulis mengawali pendidikan di taman kanak-kanak (TK) Nur Ibrahimy dan selesai tahun 2007. Pada tahun 2013 penulis telah menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasar di SDN 116874 Bakaran Batu, kemudian pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Rantau Selatan, dan pada tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Pendidikan tingkat Madrasah Aliyah Negeri di MAN 1 LabuhanBatu. Setelah menyelesaikan dari MAN pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi Administrasi Negara S1 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur SBMPTN.

Adapun riwayat lain yang penulis tempuh yaitu melakukan magang di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau pada tahun 2023. Kemudian penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pauh Angit, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singging.

Atas berkat dan Rahmat Allah SWT serta do'a dan dukungan orang-orang tercinta akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU" pada tanggal 19 Juli 2024 dibawah bimbingan Ibu Irdyanti, S.IP,MA berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada hari Rabu, 19 Juni 2024 penulis dinyatakan "LULUS" dengan Predikat "CUMLAUDE" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.